PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

Jl. Dermojoyo No. 20

Nganjuk - Jawa Timur 64418

Telp. (0358) 321666 Fax. (0358) 321752

e-mail : pn.nganjuk@gmail.com

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK KELAS I B

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Dermojoyo No. 20

Telp. (0358) 321666 Fax. (0358) 321752

Nganjuk - Jawa Timur 64418

e-mail : pn.nganjuk@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Surabaya adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Nganjuk mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Nganjuk. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 27 Juli 2026
Sekretaris
Pengadilan Negeri Nganjuk,

ANI ROSE MIYANTI
NIP. 198404112009042010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB viii
RINGKASAN ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN xi
NERACA xii
LAPORAN OPERASIONAL xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1
A. PENJELASAN UMUM 1
A.1. Dasar Hukum 1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk 2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 4
A.4. Basis Akuntansi 5
A.5. Dasar Pengukuran 5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 13
B.1 Pendapatan 13
B.2 Belanja 15
B.3 Belanja Pegawai 16
B.4 Belanja Barang 17
B.5 Belanja Modal 18
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19
B.5.3 Belanja Modal Lainnya 19
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 20
C.1. Aset Tetap 20

C.1.1. Tanah 20
C.1.2. Peralatan dan Mesin 22
C.1.3. Gedung dan Bangunan 22
C.1.4. Aset Tetap Lainnya 23
C.1.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan 23
C.1.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 24
C.2. Aset Lainnya 24
C.2.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaanya 25
C.2.2. Aset Lain–Lain 26
C.2.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 26
C.3. Kewajiban Jangka Pendek 27
C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga 27
C.3.2. Utang yang Belum Ditagihkan 27
C.3.3. Pendapatan Diterima di Muka 28
C.3.4. Uang Muka dari KPPN 28
C.3.5. Utang Jangka Pendek Lainnya 29
C.4 Ekuitas 29
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 30
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 30
D.2 Beban Pegawai 30
D.3 Beban Persediaan 31
D.4 Beban Barang dan Jasa 32
D.5 Beban Pemeliharaan 33
D.6 Beban Perjalanan Dinas 33
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 34
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 34
D.9 Kegiatan Non Operasional 35
D.10 Pos Luar Biasa 35
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 36

E.1 Ekuitas Awal 36
E.2 Surplus/Defisit LO 36
E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas 36
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset 36
E.3.2 Selisih Revaluasi Aset 36
E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 36
E.4 Transaksi Antar Entitas 37
E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas 37
E.6 Ekuitas Akhir 37
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 38
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 38
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 38
F.3. Pengungkapan Lain-Lain 38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan……14
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 30 Juni 2026 dan 2025 15
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2026 15
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026 dan 2025 16
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 17
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 18
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 19
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025..... 19
Tabel 9. Rincian Tabel Aset Tetap……20
Tabel 10. Mutasi Transaksi Tanah……20
Tabel 11. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025 Tetap……26
Tabel 12. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin……29
Tabel 13. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan……29
Tabel 14. Mutasi Aset Tetap Lainnya……30
Tabel 15. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan……31
Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap……32
Tabel 17. Rincian Aset Tetap Lainnya……32
Tabel 18. Dana Yang dibatasi Penggunaanya……33
Tabel 19. Mutasi Aset Lain-lain……34
Tabel 20. RIncian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya……34
Tabel 21. Rincian Utang Kepada Pihak Ketigai……35
Tabel 22. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka……32
Tabel 23. Rincian Uang Muka dari KPPN……;……36
Tabel 24. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2026 dan 2025…… ……37
Tabel 25. Perbandingan RIncian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025 ……37
Tabel 26. Perbandingan RIncian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025……38
Tabel 27. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025……39
Tabel 28. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025……40
Tabel 29. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 ……40
Tabel 30. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025……41

Tabel 31. Rincian Beban Piutang tak tertagih Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025.....41

Tabel 32. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 42

Tabel 33. Rincian Transaksi Antar Entitas 44

Pengadilan Negeri Nganjuk

Jalan Dermojoyo No.20, Nganjuk – Jawa Timur

Telp. 0358-321752 Fax. 0358-321666 e-mail: pn.nganjuk@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Nganjuk Semester I Tahun 2026 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Nganjuk telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 27 Juli 2026
Sekretaris
Pengadilan Negeri Nganjuk,

ANI ROSE MIYANTI
NIP. 198404112009042010

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Nganjuk Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2026. Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5,404,522,00 atau mencapai 121% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp4.469.000,00. Realisasi Belanja Negara Semester I Tahun 2026 adalah sebesar Rp7.167.961.198,00 atau masih dibawah capaian (59%) dari alokasi anggaran sebesar Rp12.081.182.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp24.091.478.009,00, yang terdiri dari: Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp24.075.948.009,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp728.617.196,00 dan Rp23.362.869.883,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp11.918.867,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp7.196.543.567,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp7.184.724.700,00), Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos- Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp4.029.281,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp7.180.695.419,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp23.362.869.883,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp7.180.695.419,00), ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas sebesar (Rp0,00), kemudian ditambah dengan koreksi lain-lain sebesar (Rp0,00) dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.162.556.676,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp23.362.869.883,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2026			30 JUNI 2025		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	**B.1**						
Pendapatan	B.1	4.469.000,00	5.404.522,00	121	5.498,00	13.789.284,00	2.510,805
Jumlah Pendapatan		**4.469.000,00**	**5.404.522,00**	**121**	**5.498,00**	**13.789.284,00**	**250.805**
BELANJA	**B.2**						
Belanja Pegawai	B.3	9.807.631.000,00	6.216.477.726,00	63,38409067	4.935.721.000,00	3.760.024.145,00	76,17983563
Belanja Barang	B.4	2.163.551.000,00	891.834.410,00	41,22086376	1.361.766.000,00	3.164.367.912,00	232,3723688
Belanja Modal	B.5	110.000.000,00	59.649.062,00	54,22642	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja		**12.081.182.000,00**	**7.167.961.198,00**	**53**	**6.297.487.000,00**	**6.924.392.057,00**	**103**

NERACA

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NERACA

PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
ASET			
Aset Lancar	**C. 1**		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	15.000.000,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	-	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.3	389.070,00	0,00
Persediaan	C. 1.4	150.000,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		**15.539.070,00**	**0,00**
Aset Tetap	**C. 2**		
Tanah	C. 2.1	21.294.491.000,00	21.294.491.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	3.288.789.805,00	3.311.499.805,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	6.978.743.990,00	6.978.743.990,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	6.545.062,00	6.545.062,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	C. 2.5	(7.542.320.910,00)	(7.269.350.256,00)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	C. 2 6	49.699.062,	-
Jumlah Aset Tetap		**24.075.948.009,00**	**24.321.929.601,00**
ASET LAINNYA	**C. 3**		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 3.1	-	-
Aset Lain-Lain	C. 3.2	33.356.000,00	265.827.454,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.3	(33.356.000,00)	(265.827.454,00)
Jumlah Aset Lainnya		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**24.091.487.079,00**	**24.321.929.601,00**
Kewajiban Jangka Pendek	**C. 4**		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	637.435.884,00	936.843.953,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	76.181.312,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.3	-	10.154.556,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	15.000.000,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**728.617.196,00**	**946.998.509,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**728.617.196,00**	**946.998.509,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	23.362.869.883,00	23.381.008.626,00
JUMLAH EKUITAS		**23.362.869.883,00**	**23.381.008.626,00**

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2026	30 JUNI 2025
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	11.918.867,00	16.017.284,00
JUMLAH PENDAPATAN		**11.918.867,00**	**16.017.284,00**
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	5.937.576.650,00	3.499.736.594,00
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	39.308.508,00	29.244.275,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	665.487.378,00	362.359.952,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	220.599.405,00	226.571.342,00
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	28.040.972,00	11.784.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	305.630.654,00	320.085.954,00
JUMLAH BEBAN		**7.196.643.567,00**	**4.449.782.117,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(7.184.724.700,00)**	**(4.433.764.833,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	E. 1	1247000,00	0,00
Pendapatan Pelepasan Aset	E. 2	1247000,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E 3	2782281,00	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E 4	2782281,00	
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**4.029.281,00**	0,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**4.029.281,00**	
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		**(7.180.695.419,00)**	**(4.433.763.833,00)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2026 DAN 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	**E. 1**	**23.381.008.626,00**	**24.959.375.353,00**
SURPLUS / DEFISIT	**E. 2**	**(7.180.695.419,00)**	**(4.433.763.833,00)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		**0,00**	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0,00	0,00
Lain-lain	E. 4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E. 5**	**7.162.556.676,00**	**3.746.234.861,00**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(18.138.743,00)	(687.528.972,00)
EKUITAS AKHIR	**E. 6**	**23.362.869.883,00**	**24.271.846.381,00**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat**;**
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2023 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk

Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Nganjuk

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung Tahun 2020-2025 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung menetapkan visi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NGANJUK YANG AGUNG".

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung yang mengelola *man*, *money*, dan *material* Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mempunyai peran yang sangat penting mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Pengadilan Negeri Nganjuk mempunyai peranan utama dalam membangun opini Mahkamah Agung khususnya dibidang pelaporan keuangan dan aset;
3. Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung disamping mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pelaksanaan perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan keprotokolan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi:

1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana dan lain-lain;
2. Adanya Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran, dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan Peradilan;
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (termasuk luar negeri/lembaga donor).

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Nganjuk yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk;

Tujuan

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Nganjuk adalah:

1. Terwujudnya dukungan *man, money*, dan *material* atas tugas fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
2. Terlaksananya layanan rumah tangga Mahkamah Agung sesuai dengan indikator tujuan.

Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Negeri Nganjuk menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, dan BMN yang akuntabel;
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Surabaya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, *multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Surabaya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk Tahun 2026 mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp11.885.182.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Nganjuk telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2026

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 30 Juni 2026	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.469.000,00	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	5.404.522,00
Jumlah Pendapatan	**4.469.000,00**	**5.404.522,00**
Belanja		
Belanja Pegawai	9.807.631.000,00	6.216.477.726,00
Belanja Barang	2.163.551.000,00	891.834.410,00
Belanja Modal	110.000.000,00	59.649.062,00
Jumlah Belanja	**12.081.182.000,00**	**7.167.961.198,00**

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp5.404.522,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp5.404.522,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.469.000,00. Pendapatan Pengadilan Negeri Nganjuk terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN serta Pendapatan Lain-Lain.

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Tinggi Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2026		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha	4.469.000,00	5.404.522,00	120,93
4259	Pendapatan Lain-Lain	0,00	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		**4.469.000,00**	**5.404.522,00**	**120,93**
Pengembalian		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Pendapatan Netto		**4.469.000,00**	**5.404.522,00**	**120,93**

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp8.384.762,00 atau 60,80% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2025. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya Pendapatan Lain-lain seperti pendapatan sewa BMN berupa kantin yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025.

Perbandingan realisasi PNBP 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP Per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4251	**Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN**	**-**	**13.789.284,00**	**-**	**-**
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	0,00	-	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	**5.404.522,00**	0,00	5.404.522,00	100,00
4259	**Pendapatan Lain-Lain**	**-**	**-**	**-**	0,
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0,
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		**5.404.522,00**	**13.789.284,00**	**(8.384.762,00)**	**(60,81)**
Pengembalian		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Pendapatan Netto		**5.404.522,00**	**13.789.284,00**	**(8.384.762,00)**	**(60,81)**

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Rp7.167.961.198,00.

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Nganjuk pada periode 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp7.167.961.198,00 atau 59% dari anggaran belanja sebesar Rp12.081.182,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2026 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2026

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	9.807.631.000,00	6.216.477.726,00	63,38
52	Belanja Barang	2.163.551.000,00	891.834.410,00	41,22
53	Belanja Modal	110.000.000,00	59.649.062,00	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		**12.081.182.000,00**	**7.167.961.198,00**	**59,33**
Pengembalian		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		**12.081.182.000,00**	**7.167.961.198,00**	**59,33**

Realisasi belanja periode 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp4.913.220.802,00 atau 1,90% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- Belanja Pegawai

  Meningkatnya Belanja Pegawai khususnya bagi Hakim yang direalisasikan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan publik berupa penambahan pegawai pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk (PNS dan PPPK).
- Belanja Barang

  Meningkatnya Belanja Barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2026 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		30 Juni 2026	30 Juni 2025	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	6.216.477.726,00	3.164.367.912,00	3.052.109.814,00	96,45
52	Belanja Barang	891.834.410,00	595.656.233,00	296.178.177,00	49,72
53	Belanja Modal	59.649.062,00	-	59.649.062,00	100,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas		**7.167.961.198,00**	**3.760.024.145,00**	**3.407.937.053,00**	**90,64**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp6.216.477.726,00.

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.216.477.726,00 dan Rp3.164.367.912,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp3.052.109.814,00 atau 96,45% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2026. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2026	30 Juni 205	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.148.520.340,00	1.349.026.000,00	(200.505.660,00)	(14,86)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.570,00	19.386,00	(3.816,00)	(19,68)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72.392.454,00	76.824.848,00	(4.432.394,00)	(5,77)
Belanja Tunj. Anak PNS	22.250.422,00	22.279.581,00	(29.159,00)	(0,13)
Belanja Tunj. Struktural PNS	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	57.195.000,00	52.010.000,00	5.185.000,00	9,97
Belanja Tunj. PPh PNS	9.755.781,00	10.030.913,00	(275.132,00)	(2,74)
Belanja Tunj. Beras PNS	54.966.780,00	61.050.000,00	(6.083.220,00)	(9,96)
Belanja Uang Makan PNS	149.263.000,00	152.998.000,00	(3.735.000,00)	(2,44)
Belanja Tunjangan Umum PNS	10.280.000,00	23.965.000,00	(13.685.000,00)	(57,10)
Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	924.938.830,00	205.373.636,00	719.565.194,00	350,37
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3.514.700.000,00	1.612.609.000,00	1.902.091.000,00	100,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0,00	0,00	-	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	165.737.900,00	22.870.400,00	142.867.500,00	624,68
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.471,00	688,00	1.783,00	259,16
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12.430.341,00	0,00	12.430.341,00	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3.678.925,00	0,00	3.678.925,00	
Belanja Tunjangan Umum PPPK	10.585.000,00	2.800.000,00	7.785.000,00	278,04
Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.076.035,00	579.360,00	11.496.675,00	1.984,38
Belanja Uang Makan PPPK	26.889.000,00	2.940.000,00	23.949.000,00	100,00
Realisasi Belanja Bruto	**6.216.477.849,00**	**3.616.748.718,00**	**2.599.729.131,00**	**71,88**
Pengembalian	**(752.536,00)**	**(3.358.585,00)**	**2.606.049,00**	**(77,59)**

Kenaikan realisasi belanja pegawai secara umum disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. pembayaran kekurangan tunjangan jabatan hakim yang dibayarkan selama 2 bulan januari dan februari 2026;
2. penambahan jumlah pegawai yang berasal dari mutasi masuk pegawai, penerimaan PPPK Pengadilan Negeri Nganjuk tahun 2025;

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp893.469.410,00

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp891.834.410,00 dan Rp595.656.233,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp296.178.177,00 atau 33,20% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	498.355.759,00	270.141.385,00	228.214.374,00	84,48
Belanja Barang Non Operasional	1.635.000,00	975.000,00	660.000,00	100,00
Belanja Barang Persediaan	38.473.508,00	34.561.010,00	3.912.498,00	11,32
Belanja Jasa	118.532.578,00	29.699.654,00	88.832.924,00	299,10
Belanja Pemeliharaan	217.338.769,00	219.877.107,00	(2.538.338,00)	(1,15)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.133.769,00	9.892.000,00	9.241.769,00	93,43
Realisasi Belanja Bruto	**893.469.383,00**	**565.146.156,00**	**328.323.227,00**	**58,10**
Pengembalian	**(1.635.000,00)**	**(1.635.123,00)**	**123,00**	**(0,01)**
Realisasi Belanja Netto	**891.834.383,00**	**563.511.033,00**	**328.323.350,00**	**58,26**

Kenaikan realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Terdapat kelonggaran/relaksasi pada beberapa pos belanja, yang sebelumnya terkena kebijakan efisiensi dari pemerintah, antara lain belanja persediaan dan belanja perjalanan dinas dalam negeri

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp59.649.062,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp59.649.062,00 dan Rp 0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp59.649.0662,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.699.062,00	0,00		
Realisasi Belanja Bruto	**59.649.062,00**	**-**	**59.649.062,00**	**100,00**
Pengembalian	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Realisasi Belanja Netto	**59.649.062,00**	**-**	**59.649.062,00**	**#DIV/0!**

Kenaikan realisasi Belanja Modal dikarenakan adanya pengadaan alat kantor berupa meja dan kursi bagi 2 CPNS tahun 2025 & Pembangunan ruang tunggu sidang Pengadilan Negeri Nganjuk.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp9.950.000,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp9.950.000,00 dan Rp0,00. Terdapat kenaikan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan periode 30 Juni 2025.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	30 Juni 2026	30 Juni 2025	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.950.000,00	-	9.950.000,00	100,00
Realisasi Belanja Bruto	**9.950.000,00**	**-**	9.950.000,00	100,00
Pengembalian	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Realisasi Belanja Netto	**9.950.000,00**	**0,00**	9.950.000,00	**100,00**

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp49.699.062,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp49.699.062,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan dikarenakkan adanya pembangunan ruang tunggu sidang di Pengadilan Negeri Nganjuk.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak mengalami penurunan maupun kenaikan karena tidak ada pagu anggaran Belanja Modal lainnya pada tahun anggaran 2026.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Tetap

Aset Tetap Rp24.075.948.009,00

Nilai Aset Tetap Pengadilan Negeri Nganjuk per 30 Juni 2026 dan 301 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp24.075.948.009,00 dan Rp24.321.929.601,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Negeri Nganjuk berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	Mutasi	31 Desember 2025
1	Tanah	21.294.491.000,00	-	21.294.491.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.288.789.805,00	(22.710.000)	3.311.499.805,00
3	Gedung dan Bangunan	6.978.743.990,00	-	6.978.743.990,00
4	Aset Tetap Lainnya	6.545.062,00	-	6.545.062,00
5	Kontruksi Dalam Pengerjaan	49.699.062,00	-	-
6	AKUMULASI PENYUSUTAN	(7.542.320.910,00)	272.970.654	(7.269.350.256,00)
Jumlah		**24.075.948.009,00**	**250.260.654,00**	**24.321.929.601,00**

C.1.1. Tanah

Tanah Rp21.294.491.000,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp21.294.491.000,00 dan Rp21.294.491.000,00 . Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2025.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	**21.294.491.000,00**
Mutasi tambah:	**0,00**
Mutasi kurang:	**0,00**
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2026	**21.294.491.000,00**

Tabel 11. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2026

No.	Luas (m^2)	Lokasi	Nilai
1	2.385	Jl. Gondowardoyo No.6, RT/RW 001/002, Payaman, Nganjuk	5.407.879.000,00
2	3.000	Jl. Dermojoyo No.20, Payaman, Nganjuk	8.592.222.000,00
3	989	Jl. Dermojoyo No.20B, Payaman, Nganjuk	2.662.478.000,00
4	394	Jl. Veteran No.83, RT/RW 003/002, Ganungkidul, Nganjuk	1.160.092.000,00
5	300	Jl. Mastrip II/75, RT/RW 002/005, Mangundikaran, Nganjuk	540.093.000,00
6	1.000	Jl. Mastrip No.24, RT/RW 005/003, Ganungkidul, Nganjuk	2.931.727.000,00
Jumlah			21.294.491.000,00

C.1.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp3.288.789.805,00

Peralatan dan Mesin merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup berbagai jenis mesin, peralatan baik TIK maupun Non TIK, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional. Nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3.288.789.805,00 dan 3.311.499.805,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	**3.311.499.805,00**
Pembelian (Pengadaan Belanja Modal)	-
Jumlah Mutasi Tambah	**0,00**
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**(22.710.000,00)**
Jumlah Mutasi	**(22.710.000,00)**
Saldo per 30 Juni 2026	**3.288.789.805,00**
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	**3.288.789.805,00**

Terdapat mutasi berkurang untuk peralatan dan mesin Pengadilan Negeri Nganjuk di TA 2026 dikarenakan adanya penghapusan untuk peralatan dan mesin.

C.1.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp6.978.743.990,00

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pengadilan Negeri Nganjuk per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6.978.743.990,00 dan Rp6.978.743.990,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang terhadap aset Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

C.1.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp6.545.062,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp6.545.062,00 dan Rp6.545.062,00.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode 31 Desember 2025.

Tabel 14. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	**6.545.062,00**
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**0,00**
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Jumlah Mutasi	**0,00**
Saldo per 30 Juni 2026	**6.545.062,00**
Akumulasi Penyusutan	(7.269.350.256,00)
Nilai Buku	**(7.262.805.194,00)**

C.1.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp49.699.062,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp49.699.062,00 dan Rp0,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan Gedung Bangunan pada Satuan Kerja di Pengadilan Negeri Nganjuk yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 15. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	**-**
Perolehan KDP	49.699.062,00
Pengembangan KDP	-
Perolehan Lainnya KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	**49.699.062,00**
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Jumlah Mutasi	**49.699.062,00**
Saldo per 30 Juni 2026	**49.699.062,00**

Terdapat mutasi tambah pada aset KDP pada periode 30 Juni 2026.

C.1.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp7.542.320.910,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing (Rp7.542.320.910,00) dan (Rp.7.269.350.256,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 16. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	3.288.789.805,00	(2.827.630.022,00)	461.159.783,00
2	Gedung dan Bangunan	6.978.743.990,00	(4.409.060.234,00)	2.569.683.756,00
3	Aset Tetap Lainnya	6.545.062,00	0,00	6.545.062,00
Jumlah		**10.274.078.857,00**	**(7.236.690.256,00)**	**3.037.388.601,00**

C.2. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 dan Rp6.077.534,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke

dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Nganjuk terdiri dari Dana yang dibatasi penggunaanya dan Aset Lain-lain.

Rincian Aset Lainnya periode 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 17. Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dana yang dibatasi penggunaanya	-	0,00	0,00
2	Aset Lain-lain	33.356.000,00	(33.356.000,00)	0,00
Jumlah		**33.356.000,00**	**(33.356.000,00)**	**0,00**

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode 30 Juni 2026.

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**0,00**
Nihil	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	**0,00**
Jumlah Mutasi	**0,00**
Saldo per 30 Juni 2026	**-**
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	**-**

C.2.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaanya

Dana Yang Dibatasi Penggunaanya Rp0,00

Dana yang dibatasi penggunaanya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 dan Rp6.077.534,00. Dana yang dibatasi penggunaanya adalah uang tunai atau setara kas yang disisihkan dan tidak dapat digunakan secara langsung untuk operasional umum hanya untuk tujuan spesifik.

Terdapat mutasi tambah Dana yang dibatasi penggunaanya pada periode 30 Juni 2026.

Tabel 18. Dana yang dibatasi penggunaannya

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	**6.077.534,00**
-	**0,00**
Jumlah Mutasi Tambah	**0,00**
-	**0,00**
Jumlah Mutasi Kurang	**6.077.534,00**
Jumlah Mutasi	**6077534,00**
Saldo per 30 Juni 2026	**-**
Akumulasi Amortisasi	-
Nilai Buku	**-**

C.2.2. Aset Lain–Lain

Aset Lain-Lain Rp33.356.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp33.356.000,00 dan Rp696.000,00.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Tinggi Surabaya serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Terdapat mutasi kurang Aset Lain-lain Pengadilan Negeri Nganjuk pada periode Semester I Tahun 2026.

Tabel 19. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2025	**696.000,00**
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	**0,00**
Perubahan Kondisi	33.356.000,
Jumlah Mutasi Kurang	**32.660.000,**
Jumlah Mutasi	**32.660.000,**
Saldo per 30 Juni 2026	**33.356.000,00**
Akumulasi Penyusutan	**(33.560.000,00)**
Nilai Buku	**- 204.000,00**

C.2.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (Rp33.356.000,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing (Rp33.356.000,00) dan (Rp696.000,00). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dana yang dibatasi penggunaanya	-	0	-
2	Aset Lain-Lain	33.356.000,00	(33.356.000)	-
Jumlah		**33.356.000,00**	**(33.356.000,00)**	**-**

C.3. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp728.617.196,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp728.617.196,00 dan Rp946.998.509,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Nganjuk merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, dan Pendapatan Diterima Dimuka.

C.3.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp637.435.884,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp637.435.884,00 dan Rp936.843.953,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

C.3.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp76.181.312,00

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp76.181.312,00 dan Rp0,00.

Rangkuman Utang yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 10. Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	76.181.312,00	
Jumlah		**76.181.312,00**	

C.3.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan Rp10.154.556,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Saldo nihil karena telah dilakukan jurnal balik awal tahun.

Rangkuman Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 11. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	-	0,00
Jumlah		**0,00**

C.3.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp15.000.000,00

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp15.000.000,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Rangkuman Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 12. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Uang Muka dari KPPN	15.000.000,00
Jumlah		**15.000.000,00**

C.3.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

C.4 Ekuitas

Ekuitas Rp23.362.869.883,00

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp23.362.869.883,00 dan Rp23.381.008626,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp2.622.241,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp2.622.241,00 dan Rp7.849.719,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 13. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
Pendapatan PNBP Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.247.000,00	-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	7.849.719,00	(100,00)
3	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.375.241,00	-	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		**0,00**	**0,00**	-
Total		**2.622.241,00**	**7.849.719,00**	**(66,59)**

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin & Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi berasal dari Penjualan Inventaris Kantor berupa Peralatan Mesin yang sudah dinyatakan kondisi rusak berat dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang oleh KPKNL Madiun.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp5.937.576.650,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp5.937.576.650,00 dan Rp3.499.736.594,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 14. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	TA 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.292.245.740,00	1.511.313.740,00	(14,50)
2	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-
3	Beban Pembulatan Gaji PNS	17.284,00	21.676,00	(20,26)
4	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-
5	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	81.419.194,00	85.910.639,00	(5,23)
6	Beban Tunj. Anak PNS	24.994.910,00	24.906.639,00	0,35
7	Beban Tunj. Struktural PNS	23.400.000,00	23.400.000,00	-
8	Beban Tunj. Fungsional PNS	62.210.000,00	57.625.000,00	7,96
9	Beban Tunj. PPh PNS	9.786.533,00	10.044.895,00	(2,57)
10	Beban Tunj. Beras PNS	61.774.260,00	68.292.060,00	(9,54)
11	Beban Uang Makan PNS	122.600.000,00	152.438.000,00	(19,57)
12	Beban Tunjangan Umum PNS	11.565.000,00	26.915.000,00	57,03
14	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	796.428.695,00	222.178.458,00	100,00
15	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	3.197.400.000,00	1.287.500.000,00	100,00
16	Beban Gaji Pokok PPPK	188.598.300,00	22.870.400,00	724,64
17	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.805,00	688,00	307,70
18	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14.144.871,00	0,00	100,00
19	Beban Tunjangan Anak PPPK	4.186.363,00	0,00	100,00
20	Beban Tunjangan Fungsional PPPK		2.800.000,00	(100,00)
21	Beban Tunjangan Beras PPPK	13.741.695,00	579.360,00	2.271,88
22	Beban Uang Makan PPPK	21.016.000,00	2.940.000,00	614,83
23	Beban Tunjangan Umum PPPK	12.045.000,00	0,00	100,00
Total		**5.937.576.650,00**	**3.499.736.555,00**	**69,66**

Terdapat kenaikan beban pegawai pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026 sebesar 69,66% yang secara umum disebabkan oleh pengurangan jumlah pegawai yang berasal dari mutasi keluar dan pensiun pegawai dan perubahan nominal gaji pejabat negara dari Pengadilan Negeri Nganjuk.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp39.308.508,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp39.308.508,00 dan Rp29.244.275,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan pada periode Semester I Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 34,41.

Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	39.308.508	29.244.275	34,41
Total		**39.308.508,00**	**29.244.275,00**	**34,41**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp665.487.378,00

Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp665.487.378,00 dan Rp362.359.952,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 16. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	544.225.633,00	301.341.385,00	80,60
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	256.500,00	2.641.500,00	(90,29)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	15.174.126,00	25.029.070,00	(39,37)
4	Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	2.839.507,00	(100,00)
5	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.440.000,00	675.000,00	113,33
6	Beban Bahan	195.000,00	300.000,00	(35,00)
7	Beban Listrik	55.123.269,00	0,00	-
8	Beban Langganan Telepon	346.320,00	346.320,00	-
9	Beban Sewa	48.726.530,00	28.602.570,00	70,36
8	Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	-
Total		**665.487.378,00**	**361.775.352,00**	**83,95**

Kenaikan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026 sebesar 83,95% disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Kenaikan signifikan pada pos beban keperluan perkantoran lainnya;

2. Kenaikan pada pos beban peralatan dan mesin ekstrakomptabel.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp220.599.405,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp220.599.405,00 dan Rp226.571.342,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113.997.944,00	146.269.314,00	(22,06)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	18.079.147,00	13.052.441,00	38,51
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.427.314,00	62.070.352,00	42,46
Total		**220.504.405,00**	**221.392.107,00**	**(0,40)**

Terdapat penurunan beban pemeliharaan pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026 sebesar (0,40) % yang secara umum disebabkan oleh penurunan pelaksanaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang belum optimal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp28.040.972,00

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp28.040.972,00 dan Rp11.783.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.040.972,00	11.738.000,00	138,89
Total		**28.040.972,00**	**11.738.000,00**	**138,89**

Terdapat kenaikan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026 sebesar 138,89%. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya frekuensi kegiatan perjalanan dinas pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp305.630.654,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp305.630.654,00 dan Rp320.085.954,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.446.283,00	109.901.583,00	(13,15)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	210.184.371,00	210.184.371,00	0,00
Jumlah Penyusutan		**305.630.654,00**	**320.085.954,00**	**(4,52)**

Beban penyusutan dan amortisasi pada periode pelaporan Tahunan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 4,52%. Penurunan ini disebabkan oleh terdapat penghapusan aset Satuan Kerja Pengadilan Negeri Nganjuk di periode 30 Juni 2026.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Tabel 20. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Beban penyisihan piutang tak tertagih tidak mengalami penurunan maupun kenaikan pada periode pelaporan Semester I Tahun 2026.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Rp0,00

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 21. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
1	Nihil	0,00	0,00	100,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat kenaiakan maupunpenurunan defisit dari kegiatan non operasional periode Semester I Tahun 2026.

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2026 dan 2025.

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp23.381.008.626,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp23.381.008.626,00 dan Rp24.959.375,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO (Rp7.180.695.000,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah defisit sebesar (Rp7.180.695,00) dan (Rp4.433.763.833,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas Rp0,00

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp7.162.556.676,00

Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp7.162.556.676,00 dan Rp3.746.234.861,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 22. Rincian Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Transaksi Antar Entitas	7.162.556.676,00	3.746.234.861,00
Diterima dari Entitas Lain	0,00	0,00
Transfer Keluar	0,00	0,00
Transfer Masuk	0,00	0,00
JUMLAH	**7.162.556.676,00**	**3.746.234.861,00**

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/ Penurunan Entitas (Rp18.138.743,00)

Kenaikan dan penurunan ekuitas merujuk pada perubahan nilai ekuitas suatu entitas selama periode waktu tertentu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti laba/rugi, investasi tambahan, penarikan modal, dan pembagian dividen. Pada Pengadilan Negeri Nganjuk dalam periode hingga 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Ekuitas sebesar (Rp23.362.869.883,00) dan (Rp24.271.846.381,00).

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp23.362.869.883,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp23.362.869.883,00 dan Rp24.271.846.381,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal necara pada satuan kerja Pengadilan Negeri Nganjuk yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2026.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pada periode 30 Desember tidak terdapat temuan BPK sehingga tidak ada tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI atas belanja pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Tidak terdapat pengungkapan lain-lain pada Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Nganjuk periode Semester I tahun 2026.

1. Ralat SPM,SSBP dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB di periode 30 Juni 2026.

2. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran : ANI ROSE MIYANTI, S.H.

Pejabat Pembuat Komitmen : RATIH DWI ANGGRAENI, S.E.

Pejabat Penandatangan/Penguji SPM : IVAN DANIEL TENTUA, S.E.

Bendahara Pengeluaran : ELY DYAN PRASETYOWATI S.E.

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (098242) PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Tgl Data : 27/07/26 7:13 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 9:13 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	0	15,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	389,070	0	389,070	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	389,070	0	389,070	0.00
Persediaan	150,000	0	150,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	**15,539,070**	**0**	**15,539,070**	
ASET TETAP				
Tanah	21,294,491,000	21,294,491,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,288,789,805	3,311,499,805	(22,710,000)	(0.69)
Gedung dan Bangunan	6,978,743,990	6,978,743,990	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,545,062	6,545,062	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	49,699,062	0	49,699,062	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(7,542,320,910)	(7,269,350,256)	(272,970,654)	3.76
JUMLAH ASET TETAP	**24,075,948,009**	**24,321,929,601**	**(245,981,592)**	**(1.01)**
ASET LAINNYA				
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	6,077,534	(6,077,534)	(100.00)
Aset Lain-lain	33,356,000	696,000	32,660,000	4,692.53
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(33,356,000)	(696,000)	(32,660,000)	4,692.53
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**6,077,534**	**(6,077,534)**	**(100.00)**
JUMLAH ASET	**24,091,487,079**	**24,328,007,135**	**(236,520,056)**	**(0.97)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	637,435,884	936,843,953	(299,408,069)	(31.96)
Utang Yang Belum Ditagihkan	76,181,312	0	76,181,312	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	10,154,556	(10,154,556)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	15,000,000	0	15,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**728,617,196**	**946,998,509**	**(218,381,313)**	**(23.06)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**728,617,196**	**946,998,509**	**(218,381,313)**	**(23.06)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,362,869,883	23,381,008,626	(18,138,743)	(0.08)
JUMLAH EKUITAS	**23,362,869,883**	**23,381,008,626**	**(18,138,743)**	**(0.08)**
JUMLAH EKUITAS	**23,362,869,883**	**23,381,008,626**	**(18,138,743)**	**(0.08)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**24,091,487,079**	**24,328,007,135**	**(236,520,056)**	**(0.97)**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (098242) PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Tgl Data : 27/07/26 7:13 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 9:13 AM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

NGANJUK, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

ANI ROSE MIYANTI, SH

NIP 198404112009042010

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

ESELON I : **(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : **(0500) JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(098242) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Tgl Data : 27/07/26 7:13 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 9:18 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,918,867	16,017,284	(4,098,417)	(25.587)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,918,867	16,017,284	(4,098,417)	(25.587)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,918,867	16,017,284	(4,098,417)	(25.587)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,937,576,650	3,499,736,594	2,437,840,056	69.658
Beban Persediaan	39,308,508	29,244,275	10,064,233	34.414
Beban Barang dan Jasa	665,487,378	362,359,952	303,127,426	83.654
Beban Pemeliharaan	220,599,405	226,571,342	(5,971,937)	(2.636)
Beban Perjalanan Dinas	28,040,972	11,783,000	16,257,972	137.978
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

ESELON I : **(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : **(0500) JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : **(098242) PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Tgl Data : 27/07/26 7:13 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 9:18 AM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	305,630,654	320,085,954	(14,455,300)	(4.516)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	7,196,643,567	4,449,781,117	2,746,862,450	61.73
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(7,184,724,700)	(4,433,763,833)	(2,750,960,867)	62.046
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,247,000	0	1,247,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,247,000	0	1,247,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,782,281	0	2,782,281	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,782,281	0	2,782,281	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,029,281	0	4,029,281	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7,180,695,419)	(4,433,763,833)	(2,746,931,586)	61.955
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(7,180,695,419)	(4,433,763,833)	(2,746,931,586)	61.955

Keterangan :

FINAL

NGANJUK, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ANI ROSE MIYANTI, SH

NIP 198404112009042010

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (098242) PENGADILAN NEGERI NGANJUK

Tgl Data : 27/07/26 6:59 AM

Tgl Cetak : 27/07/26 9:22 AM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,381,008,626	24,959,375,353	(1,578,366,727)	(6.32)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7,180,695,419)	(4,433,763,833)	(2,746,931,586)	61.95
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,162,556,676	3,746,234,861	3,416,321,815	91.19
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,138,743)	(687,528,972)	669,390,229	(97.36)
EKUITAS AKHIR	23,362,869,883	24,271,846,381	(908,976,498)	(3.74)

Keterangan :

FINAL

NGANJUK, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ANI ROSE MIYANTI, SH

NIP 198404112009042010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI NGANJUK 098242

Tgl Data : 27/07/26 7:13 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 8:55 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**4,469,000**	**5,404,522**	**935,522**	**121**	**5,498,000**	**13,789,284**	**(8,291,284)**	**251**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,469,000	5,404,522	935,522	121	5,498,000	13,789,284	(8,291,284)	251
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**4,469,000**	**5,404,522**	**935,522**	**121**	**5,498,000**	**13,789,284**	**(8,291,284)**	**251**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	12,081,182,000	7,167,961,198	(4,913,220,802)	59	6,297,487,000	3,760,024,145	2,537,462,855	60
1. Belanja Pegawai	9,807,631,000	6,216,477,726	(3,591,153,274)	63	4,935,721,000	3,164,367,912	1,771,353,088	64
2. Belanja Barang	2,163,551,000	891,834,410	(1,271,716,590)	41	1,361,766,000	595,656,233	766,109,767	44
3. Belanja Modal	110,000,000	59,649,062	(50,350,938)	54	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI NGANJUK 098242

Tgl Data : 27/07/26 7:13 AM
Tgl Cetak : 27/07/26 8:55 AM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**12,081,182,000**	**7,167,961,198**	**(4,913,220,802)**	**59**	**6,297,487,000**	**3,760,024,145**	**2,537,462,855**	**60**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

NGANJUK, 27 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ANI ROSE MIYANTI, SH
NIP 198404112009042010

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 098242**	**PENGADILAN NEGERI NGANJUK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 27/07/26 10:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 27/7/26 10:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,203,409,000	1,700,966,000	1,148,520,340	0	1,148,520,340	67.52	552,445,660
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,000	27,000	15,570	123	15,447	57.21	11,553
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	127,500,000	127,500,000	72,392,454	0	72,392,454	56.78	55,107,546
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	43,075,000	43,075,000	22,250,422	0	22,250,422	51.66	20,824,578
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	30,320,000	30,320,000	20,800,000	0	20,800,000	68.6	9,520,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	55,000,000	55,000,000	57,195,000	0	57,195,000	103.99	(2,195,000)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	210,000	210,000	9,755,781	0	9,755,781	4,645.61	(9,545,781)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	107,037,000	107,037,000	54,966,780	0	54,966,780	51.35	52,070,220
511129	Belanja Uang Makan PNS	386,760,000	386,760,000	149,263,000	0	149,263,000	38.59	237,497,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,450,000	25,450,000	10,280,000	0	10,280,000	40.39	15,170,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	2,978,788,000	2,476,345,000	1,545,439,347	123	1,545,439,224	62.41	930,905,776
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	272,593,000	1,365,262,000	924,938,830	0	924,938,830	67.75	440,323,170
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,667,600,000	5,887,700,000	3,514,700,000	0	3,514,700,000	59.7	2,373,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	1,940,193,000	7,252,962,000	4,439,638,830	0	4,439,638,830	61.21	2,813,323,170
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	30,000	30,000	165,737,900	0	165,737,900	552,459.67	(165,707,900)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30,000	30,000	2,471	0	2,471	8.24	27,529
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,000	30,000	12,430,341	0	12,430,341	41,434.47	(12,400,341)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30,000	30,000	3,678,925	0	3,678,925	12,263.08	(3,648,925)
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30,000	30,000	12,076,035	0	12,076,035	40,253.45	(12,046,035)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	78,144,000	78,144,000	26,889,000	0	26,889,000	34.41	51,255,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	30,000	30,000	10,585,000	0	10,585,000	35,283.33	(10,555,000)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	78,324,000	78,324,000	231,399,672	0	231,399,672	295.44	(153,075,672)
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,997,305,000	9,807,631,000	6,216,477,849	123	6,216,477,726	63.38	3,591,153,274
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,045,922,000	1,029,758,000	482,832,133	0	482,832,133	46.89	546,925,867
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,614,000	5,614,000	349,500	0	349,500	6.23	5,264,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	46,156,000	46,156,000	15,174,126	0	15,174,126	32.88	30,981,874
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,097,692,000	1,081,528,000	498,355,759	0	498,355,759	46.08	583,172,241
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 098242**	**PENGADILAN NEGERI NGANJUK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 27/07/26 10:31 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 27/7/26 10:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	195,000	0	195,000	65	105,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,635,000	0	1,635,000	93.97	105,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68,667,000	65,067,000	38,473,508	0	38,473,508	59.13	26,593,492
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	68,667,000	65,067,000	38,473,508	0	38,473,508	59.13	26,593,492
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	125,856,000	146,685,000	66,864,726	0	66,864,726	45.58	79,820,274
522112	Belanja Langganan Telepon	7,000,000	7,000,000	415,584	0	415,584	5.94	6,584,416
522113	Belanja Langganan Air	5,700,000	5,700,000	358,000	0	358,000	6.28	5,342,000
522141	Belanja Sewa	183,120,000	183,120,000	50,894,268	0	50,894,268	27.79	132,225,732
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	321,676,000	342,505,000	118,532,578	0	118,532,578	34.61	223,972,422
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284,400,000	370,180,000	113,997,944	0	113,997,944	30.8	256,182,056
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	58,310,000	55,394,000	18,056,647	0	18,056,647	32.6	37,337,353
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150,883,000	193,337,000	85,284,178	1,635,000	83,649,178	43.27	109,687,822
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	493,593,000	618,911,000	217,338,769	1,635,000	215,703,769	34.85	403,207,231
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53,800,000	53,800,000	19,133,796	0	19,133,796	35.56	34,666,204
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	53,800,000	53,800,000	19,133,796	0	19,133,796	35.56	34,666,204
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,037,528,000	2,163,551,000	893,469,410	1,635,000	891,834,410	41.22	1,271,716,590
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	910,000,000	10,000,000	9,950,000	0	9,950,000	99.5	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	910,000,000	10,000,000	9,950,000	0	9,950,000	99.5	50,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,659,416,000	0	0	0	0		0
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	100,000,000	100,000,000	49,699,062	0	49,699,062	49.7	50,300,938
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	7,759,416,000	100,000,000	49,699,062	0	49,699,062	49.7	50,300,938
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	8,669,416,000	110,000,000	59,649,062	0	59,649,062	54.23	50,350,938
	JUMLAH BELANJA	15,704,249,000	12,081,182,000	7,169,596,321	1,635,123	7,167,961,198	59.33	4,913,220,802

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 098242**	**PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 27/07/26 10:29 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,247,000	0	1,247,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,469,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,375,241	0	1,375,241	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	4,469,000	2,622,241	0	2,622,241	58.68
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,460,281	0	1,460,281	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,322,000	0	1,322,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,782,281	0	2,782,281	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	4,469,000	5,404,522	0	5,404,522	120.93
	JUMLAH PENDAPATAN	4,469,000	5,404,522	0	5,404,522	120.93